

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentunya berkaitan dengan pemberian wewenang kepada daerah dalam mengatur daerahnya yang selanjutnya disebut dengan otonomi daerah.

Diterapkannya otonomi daerah baik di Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi-potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat mengalokasikan sumberdaya ke belanja daerah sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat didaerahnya. Semakin banyak sumber-sumber keuangan yang berhasil digali di suatu daerah, maka hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah yang semestinya diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Wertianti, 2013).

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 23 Tahun 2014). Dengan adanya otonomi daerah diharapkan semakin meningkatnya pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik sehingga mampu menarik investor untuk melakukan investasi di daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu membangun daerah secara optimal dan memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Jaya dan Dwirandra, 2014)

Fungsi-fungsi yang diambil pemerintah dapat dilakukan dengan kebijakan fiskal dengan salah satu penekanannya melalui kebijakan pengeluaran/belanja pemerintah. Kebijakan pemerintah diyakini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Di dalam pertumbuhan endogen, pengeluaran pemerintah memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi dengan asumsi implikasi pengeluaran pemerintah adalah untuk kegiatan produktif misalnya belanja infrastruktur. Belanja yang bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik akan dapat menstimulus perekonomian misalnya pembangunan infrastruktur akan mendorong investasi, dengan adanya investasi ekonomi akan berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga akan menyerap pengangguran dan memperkecil kemiskinan (Departemen Keuangan, 2014).

Bentuk pengeluaran pemerintah berupa alokasi belanja modal untuk penyediaan berbagai sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi aset daerah dan mempunyai nilai manfaat lebih satu tahun diharapkan dapat menjadi modal penunjang terlaksananya berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam penelitian (Kurniawan dkk, 2012) menunjukkan bahwa rasio belanja modal terhadap PDRB memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi namun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan masih rendahnya alokasi belanja modal untuk kegiatan pembangunan berbagai fasilitas publik sehingga belum berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada struktur PDRB Provinsi Gorontalo memperlihatkan persentasi dari lapangan usaha tahun 2008-2013. Dalam PDRB Provinsi Gorontalo penyumbang pertama masih didominasi oleh Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 28,00%. Sedangkan penyumbang terendah pada Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,53%. Penyumbang terbesar setelah sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan adalah sektor jasa sebesar 25,95% diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 11,60% serta sektor Keuangan, *Real Ested* dan Jasa Perusahaan yang mencapai 11,46%. Pada tahun 2013 sektor industri pengolahan mengalami peningkatan menjadi 5,11% dari tahu sebelumnya, dan di beberapa sektor ekonomi lainnya mengalami peningkatan dan

penurunan yang secara signifikan dari tahun sebelumnya. Pada struktur PDRB dapat kita lihat bahwa yang menjadi penyumbang terbesar dalam dua terakhir mengalami penurunan sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap pendapatan suatu daerah berkurang. Secara rinci kontribusi masing-masing sektor dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1: PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2013

Jenis Pekerjaan	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %	2012 %	2013 %
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan.	31,32	29,59	28,95	29,42	28,95	28,00
Pertambangan dan Penggalian	1,08	1,15	1,18	1,16	1,15	1,13
Industri Pengolahan	4,92	4,87	4,85	4,82	4,90	5,11
Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,58	0,55	0,54	0,54	0,54	0,53
Bangunan	6,68	6,94	6,92	6,89	7,05	7,09
Perdagangan, Hotel dan Restoran	10,25	10,31	10,37	10,75	11,03	11,60
Pengangkutan dan Komunikasi	8,74	8,88	9,03	9,08	9,04	9,13
Keuangan, <i>Real Eted</i> dan Jasa Perusahaan	9,93	10,19	10,39	10,41	11,05	11,46
Jasa – jasa	26,54	27,52	27,78	26,93	26,30	25,95

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2015

Selama tahun 2008-2013 total realisasi belanja modal Provinsi Gorontalo memperlihatkan peningkatan 156,9 miliar di tahun 2008 menjadi 184,9 miliar pada tahun 2013 dengan rata-rata setiap tahunnya sebesar 3,79%. Ditinjau dari komposisi belanja APBD, rasio belanja modal terhadap total belanja APBD dari tahun 2008 mengalami peningkatan hingga 11,96% pada tahun 2009 namun pada tahun 2010 terjadi penurunan sebesar 38,86%, 2011 memperlihatkan kembali peningkatan mencapai 23,23%

selanjutnya penurunan kembali terjadi pada tahun 2012 mencapai 2,53% hingga di tahun 2013 mengalami kenaikan hingga 25,17% selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2: Perkembangan Belanja Modal Tahun 2008-2013

Tahun	Anggaran Belanja Modal pada APBD	Realisasi Belanja Modal APBD	Rasio Belanja Modal
2008	Rp. 227.687.594.853	Rp.156.957.974.761	(3,62) %
2009	Rp 196. 422.203.952	Rp.178.273.806.526	11,96 %
2010	Rp.111.845.881.090	Rp.108.996.106.112	(38,86) %
2011	Rp. 112.527.955.442	Rp.141.984.542.254	23,23 %
2012	Rp. 147.415.186.259	Rp.138.397.573.651	(2,53) %
2013	Rp. 190.615.004.393	Rp.184.959.339.603	25,17 %
Rata-rata		-	3,79 %

Sumber: DPPKAD Provinsi Gorontalo, 2015

Penyebab rendahnya belanja modal diantaranya keterlambatan dalam tender, termin pembayaran yang belum jatuh tempo, maupun kesengajaan pemerintah daerah menahan dana untuk dibungakan. Bilamana penyebabnya adalah termin pembayaran yang belum jatuh tempo, maka kondisi tersebut lumrah, namun bila penyebabnya adalah keterlambatan tender dan kesengajaan menahan dana, maka kondisi ini tidak mendukung tujuan desentralisasi fiskal untuk percepatan pencapaian perluasan kesejahteraan masyarakat (Departemen Keuangan, 2014).

Minimnya kebijakan pengeluaran belanja modal APBD bagi penyediaan berbagai fasilitas publik akan berdampak pada tingkat ketersediaan infrastruktur yang diperlukan bagi peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat.

Sehingga perubahan komposisi belanja APBD bagi kebutuhan belanja modal guna mendorong stimulus perekonomian daerah perlu dilakukan semakin tinggi alokasi belanja modal maka diharapkan semakin tinggi pula dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Rendahnya PAD dan belanja modal membawa persoalan bagi otonomi daerah. Rendahnya PAD mengindikasikan rendahnya kemandirian daerah sehingga tidak sejalan dengan hakikat otonomi daerah yang menekankan pada pengurangan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Disisi belanja modal, rendahnya jenis belanja tersebut memperlambat pembangunan ekonomi di daerah terutama berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur secara memadai (Departemen Keuangan, 2014).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Provinsi Gorontalo)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penyumbang terbesar pada PDRB dua tahun terakhir mengalami penurunan.
2. Minimnya Belanja Modal untuk pembangunan Provinsi Gorontalo.
3. Realisasi Belanja modal tahun 2008, 2010 dan 2012 cenderung menurun.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji/mengetahui pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu akuntansi dan ekonomi regional. Disamping itu diharapkan pula hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemerintah dalam proses pengelolaan anggaran belanja modal terhadap peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan aktiva tetap lainnya.